BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tata kelola pemeliharaan ternak sapi kelompok adalah dengan sistem *gaduh* yang menjadi perikatan antara BPM-PPA, (*biro pengabdian masyarakat pondok pesantren annuqaya*) KSM (*kelompok swadata masyarakat*) dan anggota KSM sebagai peternak. Melalui sistem gaduh tersebut masyarakat didorong untuk mandiri dalam pengembangan ekonomi atas dasar kerja sama dalam kelompok dengan mengelola potensi lokal yang ada. Modal ternak sapi bersumber dari ketiga pihak tersebut. Pemilik modal pertama adalah BPM-PPA. BPM-PPA akan menyediakan uang sejumlah harga *empe'* atau anak sapi yang masih dalam masa pertumbuhan untuk dikelola oleh KSM (*kelompok swadaya msyarakat*).
2. Dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada BPM upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan ekonomi mereka dapat dirasakan. Masyaraakat tanpa mengeluarkan biaya dapat memiliki sapi tersebut sehingga memberi tambahan penghasilan.

Adapun hasil yang paling utama dari pemberdayaan masyarakat oleh BPM adalah terjadinya ikatan dan keakrabatan antara pesantren dengan masyarakat sekitar pesantren pada khususnya dan masyarakat sumenep pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Saran

1. Penelitian ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan nantinya ada orang lain yang dapat secara mendalam meneliti tentang segala aspek yang berkenaan dengan pemberdayaan pesantren. Karena semakin seseorang banyak mencari tahu tentang segala sesuatu, maka semakin banyak kekurangan-kekurangan yang melekat pada diri seseorang tersebut.
2. Bagi masyarakat yang melakukan pemberdayaan mari kita bangkit dan berjuang demi diri kita semua, jangan menyerah dan kalah dalam melawan keterbelakangan demi kehidupan bersama. Jika ada tekat untuk berubah pastilah ada jalan yang bisa mengarahkan kita pada keberhasilan.

Saran-saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Agar segera dibuatkan peraturan daerah dengan model pemberdayaan yang sesuai dengan pekerjaan masyarakat berdasarkan peruntukannya dan secara konsisten melaksanakan peruntukan tersebut, disertai pengawasan yang ketat oleh instansi yang berwenang.
b. Perlu dikembangkan sistem pengawasan biar tidak terjadi manipulasi dari pihak yang bersangkutan.
c. Mengawasi pengolahan dan pemberdayaan yang dijalani atau dilaksanakan pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id